**ABSTRAK**

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pemidanaan” pada umumnya diartikan sebagai penghukuman.

Konflik tanah di indonesia semakin hari semakin bertambah akibat dari pengaturan yang kurang seimbang dalam struktur penguasan tanah, bahkan tidak sedikit persoalaan konflik tanah berujung pemidanaan terhadap masyarakat atau petani penggarap yang mana petani tidak ada maksud tujuan merusak melainkan mengganti tanaman teh menjadi palawija, guna untuk memenuhi kebutuhan makan sehari harinya dengan status tanah eks Hak Guna Usaha .

Tanah Eks HGU adalah tanah yang sudah berakhir haknya dan tanah tersebut menjadi dalam penguasaan Negara. Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan kekuasaan yang telah diberikan kepada negara (atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) sehingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maksud dari penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang seobyektif mungkin guna, mengetahui dan memahami tentang pemidanaan terhadap petani yang memanfaatkan tanah tanah Negara eks HGU, serta menetukan kualifikasi yang diindikasikan sebagai faktor penyebab masyarakat bisa menggarap tanah negara serta sejauhmana unsur pasal 406 KUHP yang dikenakan kepada 3 orang petani penggarap oleh putusan hakim dan juga ingin mengetahui cara penyelesaian dugaan tindak pidana di atas tanah konflik eks HGU .

Tulisan yang menggunakan model pendekatan *yuridis-normatif* ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang mengkualifikasikan yang diindikasikan sebagai faktor penyebab pengusaan tanah Negara eks HGU, pemdanaan terhadap 3 orang penggarap yang mengganti tanamanTeh milik pemegang HGU sebelumnya diganti menjadi tanman palawija dan kedepan bagaimana penyelsaian dugaan tindak pidana diatas tanah Negara eks HGU

Analisis data-data dalam penulisan ini menggunakan *deskriptif analisis* dengan tujuan untuk menguraikan tentang unsur – unsur tindak pidana pasal 406 KUHP dihubungkan kebijakan hukum pertanahan, sehingga dapat diketemukan kelemahan-kelemahan yang dapat disempurnakan pada masa mendatang dapat merubahpola penyelesaian dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan konflik tanah

. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana salahsatunya dalam unsur melawan hukum( hak) sedangkan dalam PP No. 40 tahun 1996 intinya bahwa apabila masa Hak Gunua Usaha sudah berakhir maka tanah dan segala yang ada di atasnya menjadi dalam pengusaan Negara. Dalam kasus yang kami teliti tentang penggarap yang mengganti tanaman Teh menjadi Palawija dimana hakim berkayakinan bahwa tanaman Teh milik PTPN VIII Dayeuhmanggung, padahal menurut PP No.40 Tahun 1996 tanaman Teh tersebut bukan lagi milik PTPN VIII dayeuhmanggung.

ABSTRACT

Punishment is the stage of sanctions and it is of the criminal law. The word "punishment" is generally interpreted as a judgment.

Land conflicts in Indonesia is increasingly growing due to the lack of a balanced arrangement within the structure of the soil mastery, not even a problem for land conflicts led to convictions against people or peasants who were farmers no purpose to replace the tea plant damage to crops, in order to fulfill the daily of needs with the former status Ex Hak Guna Usaha land.

Ex HGU land is land that is over land rights and be in control of the State. State has a duty to regulate the possession and use of power that has been given to the state (the earth, water and the natural riches contained therein) so that all the land in the entire territory of Indonesia sovereignty utilized for the greatest welfare of the people.

The purpose of this study is aimed to obtain the data as objectively as possible in order to, to know and understand about the criminalization of the farmers who use the land of former state land concession, as well as determine the qualifications indicated as the causative factor can be working on state land and also want to know how to solve the alleged crime on the ground of conflict of ex HGU.

Writing that uses the model-normative juridical approach is to try to answer the question of who qualifies as a causative factor indicated State ex HGU procurement of land, 3 of punishment against cultivators who replace plant of tea earlier concession-holder was changed to crops and how the settlement of alleged offenses over former state land concession forward.

 Analysis of the data in this study, using descriptive analysis in order to elaborate on the elements - elements of Article 406 of the Criminal Code offenses related land law policy, so it can be found weaknesses that can be refined in the future to change the pattern of settlement of the alleged offenses relating to the land conflicts.

 Based on the research that the consideration of the judge in the criminal dropped one of them in the unlawful elements (right) while the PP. 40 1996 essentially that if the leasehold period is over the land and everything in it to be in the State procurement. In the cases we examined about cultivators who replace tea plants become crops where the judge believes that the tea plant Dayeuhmanggung PTPN VIII, whereas according to Regulation 40 of 1996 Tea plants are no longer owned by PTPN VIII Dayeuhmanggung,